

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Dewi, Ida Ayu Sri, 2005, *Bahan Pelatihan Sengketa Kepegawaian*, BKN, Jakarta.

Djarmika, Sastra dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Efendi, Luthfi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bayumedia, Malang.

Hartini, Sri dkk, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ibrahim, Jhonny, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatifedisi Revisi*, Bayumedia Publishing, Malang.

Indroharto, 2003, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Irawan, Candra, 2010, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Kansil, C.S.T, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradna Paramitha, Jakarta.

Mahfud MD, Moh, 1998, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Marbun, S.F, 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muchsan, 1982, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta.

_____, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Poerwadarminta, W.J.S, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Prijodarminto, Soegeng, 1993, *Sengketa Kepegawaian Sebagai Bagian Dari Sengketa Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Satoto, Sukanto, 2004, *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, HK Offset, Jakarta.

Siagian, Sondang P, 1996, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.

Soedaryono, 2000, *Tata Laksana Kantor*, Bumi Aksara, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soemardjono, Maria S.W, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Jakarta.

Soetarni, A. Siti, 2009, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung.

Stefanus, Kotan Y, 1995, *Mengenal Peradilan Kepegawaian di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudrajat, Tedy, 2008, *Hukum Kepegawaian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tjandra, Riawan, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Widjaja, A.W, 2008, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta.

Wiyono, R, 2008, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Hasil Penelitian dan Jurnal.

Aceh, Hainum Mawwadah, 2014, “Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistem Peradilan Tata Usaha Negara”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Agustina, Enny, 2014, “Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem PTUN”, *Ringkasan Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ardiansah, 2005, “Konsepsi Hukum Islam dalam Mewujudkan *Clean Governance dan Good Government*”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 5 No. 1

Murtiningsih, Sri, 2012, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sudiyono, 2010, “Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Thantowi, Jawahir, 2004, “Norma Hukum Pelayanan Publik”, *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No.3.

C. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) tentang Disiplin Pegawai Negeri;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5210) tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1998 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

D. Media Internet

Putusan Sidang BAPEK 02 Juli 2019: 42 PNS diberhentikan, <https://www.bkn.go.id/berita/putusan-sidang-bapek-2-juli-2019-42-pns-diberhentikan>. diakses tanggal 11 Desember 2019 pukul 21:35 WIB.